



Peran Kelompok Tani dalam Pengendalian Hama Penyakit Terpadu (PHT) Usahatani Padi di Kecamatan Makale

Bertha Tampang^{1*}, Awaluddin Yunus², Helda Ibrahim³

¹⁻³ Univeritas Islam Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: berthatampang2005@gmail.com

Abstract. *The issue of global food security is increasingly pressing amidst climate change, population growth, and environmental degradation. The agricultural sector, particularly rice production, faces threats from pests and diseases that reduce crop yields and farmer incomes. Climate change exacerbates pest attack patterns, increasing crop losses. In addition, excessive use of chemical pesticides leads to pest resistance and negative impacts on ecosystems and human health. This study used a descriptive method with a qualitative approach, and the study population included farmers who cultivate rice fields and farmer groups that have received Integrated Pest Management (IPM) in Makale District, Tana Toraja Regency, with a population of 325 families. Respondents were randomly selected at 15% of the total population, with a sample of 49 farmers consisting of three farmer groups. The results showed that the role of farmer groups in IPM implementation in Makale District includes extension and training (65.5%), facilitating access to information and resources (69%), decision-making (67.5%), and conflict management and IPM cooperation (66.5%). Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of the rice farming system, with support from the Government and the Tana Toraja Regency Agriculture Service to optimize the development of rice farming businesses.*

Keywords: *Integrated Pest And Disease Management; IPM; Makale District; Rice Farming; Role Of Farmer Groups.*

Abstrak: Isu ketahanan pangan global semakin mendesak di tengah perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan degradasi lingkungan. Sektor pertanian, khususnya produksi padi, menghadapi ancaman dari hama dan penyakit yang mengurangi hasil panen dan pendapatan petani. Perubahan iklim memperburuk pola serangan hama, meningkatkan kerugian hasil pertanian. Selain itu, penggunaan pestisida kimia yang berlebihan menyebabkan resistensi hama dan dampak negatif terhadap ekosistem serta kesehatan manusia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan populasi penelitian meliputi petani yang berusahatani di lahan sawah dan kelompok tani yang telah mendapatkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan jumlah populasi 325 KK. Responden dipilih secara acak sebanyak 15% dari total populasi, dengan sampel 49 petani yang terdiri dari tiga kelompok tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelompok tani dalam implementasi PHT di Kecamatan Makale mencakup penyuluhan dan pelatihan (65,5%), fasilitasi akses informasi dan sumber daya (69%), pengambilan keputusan (67,5%), serta pengelolaan konflik dan kerjasama PHT (66,5%). Oleh karena itu, perlu penguatan penerapan sistem usaha tani padi, dengan dukungan dari Pemerintah dan Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja untuk mengoptimalkan pengembangan usaha tani padi.

Kata kunci: Kecamatan Makale; Pengendalian Hama Penyakit Terpadu; Peran Kelompok Tani; PHT; Usahatani Padi.

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, petani padi menghadapi tantangan serupa. Penelitian oleh Bulkis et al. (2020) menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Soppeng dan Maros memiliki tingkat adopsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang tinggi, dengan 85,1% dan 88,5% responden mengadopsi PHT secara sedang hingga tinggi. Akan tetapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan teknis dan akses terhadap sumber daya masih menjadi hambatan dalam implementasi PHT secara optimal.

Kelompok tani memainkan peran kunci dalam mendukung adopsi PHT melalui penyuluhan, pelatihan, dan pertukaran informasi. Menurut Sudrajat (2020), peran kelompok tani dan penyuluh pertanian lapangan sangat dominan dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi pertanian organik di Boyolali. Hal ini menunjukkan pentingnya peran kelembagaan dalam mendukung praktik pertanian berkelanjutan.

Meskipun peran kelompok tani dalam PHT telah diakui, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Penelitian oleh Hamzah dan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor (2020) di Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, menunjukkan bahwa partisipasi petani dalam PHT berada pada kategori sedang hingga rendah, dengan faktor-faktor seperti motivasi petani dan peran penyuluh pertanian mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam memahami peran spesifik kelompok tani dalam pengendalian hama terpadu di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana kelompok tani di Makale berperan dalam implementasi PHT dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model PHT berbasis komunitas serta kontribusi praktis dalam merancang strategi pemberdayaan kelompok tani untuk pengendalian hama terpadu yang lebih efektif. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang peran kelembagaan dalam pertanian berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kebijakan pertanian lokal dalam mendukung implementasi PHT yang lebih efektif dan efisien.

2. KAJIAN TEORITIS

Integrasi Teori dan Landasan Nilai dalam Islam

Dalam memahami peran kelompok tani dalam pengendalian hama penyakit terpadu (PHT), berbagai teori sosial dan pembangunan dapat dijadikan landasan konseptual yang saling melengkapi. Kelima teori berikut menggambarkan keterkaitan antara aspek sosial, partisipatif, kelembagaan, dan spiritual dalam pelaksanaan PHT yang berkelanjutan.

Teori Partisipasi (*Cohen dan Uphoff, 1980*) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program pembangunan, termasuk pertanian, sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi. Dalam konteks PHT, partisipasi aktif anggota kelompok tani mencerminkan tanggung jawab bersama untuk menjaga produktivitas lahan dan

keseimbangan ekosistem pertanian. Partisipasi ini membangun rasa memiliki, memperkuat kebersamaan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan pertanian.

Teori Difusi Inovasi (*Rogers, 2003*) menekankan pentingnya komunikasi dan penyebaran inovasi pertanian, seperti PHT, melalui saluran sosial yang efektif. Kelompok tani berperan sebagai *agen perubahan* yang menyebarluaskan teknologi ramah lingkungan kepada anggota lain dan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, penyuluh pertanian dan pengurus kelompok berperan sebagai penghubung antara sumber informasi teknologi dan pelaku utama, yaitu petani. Melalui proses ini, teknologi PHT dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan secara berkelanjutan.

Teori Pemberdayaan (*Chambers, 1997*) memberikan dasar bahwa petani harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang memungkinkan petani memahami ekosistem pertanian, mengenali musuh alami, serta mengambil keputusan tepat dalam mengendalikan hama. Melalui kelompok tani, petani memperoleh kekuatan sosial dan pengetahuan untuk mengelola sumber daya pertanian secara mandiri. Pemberdayaan ini sejalan dengan semangat *self-reliance* (kemandirian) yang menjadi prinsip utama dalam PHT.

Teori Dinamika Kelompok (*Cartwright & Zander, 1968*) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, kepemimpinan, dan tujuan bersama antar anggota. Kelompok tani yang memiliki komunikasi baik, solidaritas tinggi, dan kepemimpinan efektif akan lebih berhasil dalam menerapkan kegiatan PHT di lapangan. Dinamika kelompok yang kuat menciptakan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menjaga tanaman dari serangan hama tanpa merusak lingkungan.

Teori Sistem Sosial (*Talcott Parsons, 1951*) menempatkan kelompok tani sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola (AGIL). Dalam sistem ini, kelompok tani berfungsi menjaga keseimbangan antara aspek teknis dan sosial pertanian. Setiap anggota berperan saling melengkapi, sehingga keberlanjutan kegiatan PHT dapat terjaga melalui adaptasi terhadap kondisi lingkungan, pencapaian tujuan bersama, dan pelestarian nilai-nilai kelompok.

Secara keseluruhan, kelima teori tersebut saling terhubung dan membentuk kerangka pemahaman bahwa keberhasilan penerapan PHT tidak hanya bergantung pada teknologi pertanian, tetapi juga pada partisipasi, pemberdayaan, komunikasi, kerja sama sosial, dan kelembagaan kelompok tani yang kuat. PHT yang efektif lahir dari petani yang mandiri, berpengetahuan, dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah cara mengelola hama tanaman dengan menggabungkan berbagai metode pengendalian agar ekosistem pertanian tetap seimbang dan ramah lingkungan. Menurut Effendi (2020), PHT merupakan sistem pengendalian hama yang memadukan cara mekanis, biologis, dan kimiawi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta keamanan hasil pertanian.

Filosofi dasar PHT muncul sebagai reaksi terhadap dampak buruk penggunaan pestisida kimia yang berlebihan, seperti timbulnya hama yang tahan pestisida, meningkatnya populasi hama lain, dan rusaknya lingkungan. Sejak diperkenalkan secara global pada tahun 1960-an oleh Food and Agriculture Organization (FAO, 2024), PHT berkembang menjadi pendekatan utama dalam perlindungan tanaman modern. Di Indonesia, konsep ini mulai diperkuat melalui program nasional Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Management/IPM) yang diluncurkan pada tahun 1986, dan sejak itu menjadi dasar kebijakan pertanian berkelanjutan (Budiyanto, 2018; Effendi, 2020).

Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di kalangan petani, terutama pada tanaman pangan seperti padi dan hortikultura, terbukti dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem pertanian.

Prinsip-prinsip utama dalam PHT mencakup empat komponen inti, yaitu:

- a. Budidaya tanaman sehat, dengan pemilihan benih unggul, pengolahan tanah yang baik, dan pemupukan berimbang;
- b. Pelestarian musuh alami, melalui perlindungan predator dan parasitoid yang berperan dalam menekan populasi hama secara alami;
- c. Pengamatan rutin di lapangan (monitoring) untuk mengetahui perkembangan hama dan kondisi tanaman; serta
- d. Pengambilan keputusan berdasarkan ambang kendali, di mana tindakan pengendalian dilakukan hanya jika populasi hama telah melewati batas ekonomi yang merugikan (Effendi, 2020).

Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) bukan hanya metode untuk mengendalikan hama, tetapi juga merupakan pendekatan yang memperhatikan aspek ekologi dan sosial-ekonomi. Dalam konsep ini, petani berperan sebagai pengambil keputusan utama dengan tujuan mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan.

Komponen-Komponen Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah pendekatan ramah lingkungan dalam mengelola organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan menggabungkan berbagai metode pengendalian secara terpadu. Tujuannya bukan hanya membasmi hama, tetapi menjaga

keseimbangan ekosistem agar populasi hama tetap di bawah ambang kerugian ekonomi. Keberhasilan PHT sangat bergantung pada kemampuan petani menyesuaikan teknik pengendalian dengan kondisi ekosistem setempat (Effendi, 2020).

Berdasarkan kajian Budiyanto (2018) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja (2023), terdapat beberapa komponen utama yang menjadi landasan penerapan PHT, yaitu:

a. Teknik Budidaya Tanaman Sehat

Budidaya tanaman sehat merupakan langkah awal pencegahan hama dan penyakit. Kegiatannya meliputi penggunaan benih unggul tahan penyakit, pengolahan tanah yang baik, penanaman tepat waktu, dan pemupukan seimbang. Tanaman yang sehat memiliki ketahanan alami terhadap hama, sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida (Effendi, 2020). Rotasi tanaman dan sanitasi lahan juga membantu memutus siklus hidup hama dan patogen.

b. Pengendalian Hayati

Pengendalian hayati dilakukan dengan memanfaatkan organisme hidup seperti predator, parasitoid, dan patogen untuk menekan populasi hama. Contohnya antara lain *Trichogramma spp.*, *Beauveria bassiana*, dan *Bacillus thuringiensis* (Budiyanto, 2018). Cara ini efektif, ramah lingkungan, dan dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida sintetis, terutama di lahan pertanian organik (BPS, 2023).

c. Pengendalian Fisik dan Mekanis

Pengendalian mekanis dilakukan dengan cara fisik untuk mengurangi populasi hama, seperti mengambil hama secara manual, menggunakan perangkap feromon atau lampu, serta mengolah tanah untuk mematikan pupa dan larva. Metode ini efektif di lahan sempit dan memerlukan biaya rendah (Effendi, 2020)

d. Pengendalian Genetik

Pengendalian melalui varietas tahan hama dilakukan dengan menanam varietas yang memiliki ketahanan genetik terhadap hama atau penyakit. Contohnya padi varietas IR64 dan Ciherang. Pemilihan varietas yang sesuai dengan kondisi lingkungan dapat mengurangi risiko ledakan hama dan menekan penggunaan pestisida (Budiyanto, 2018).

e. Pengendalian Kimiawi Selektif

Pengendalian kimiawi merupakan langkah terakhir jika cara lain belum efektif menekan populasi hama. Pestisida digunakan secara selektif dengan jenis, dosis, waktu, dan sasaran yang tepat. Penggunaan pestisida yang bijak menjaga keamanan musuh

alami dan lingkungan (Effendi, 2020). Di Tana Toraja, penggunaan pestisida sintetis menurun seiring meningkatnya kesadaran petani terhadap prinsip PHT (BPS, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Pemilihan lokasi dilakukan dengan sengaja dengan dasar pertimbangan bahwa : wilayah ini merupakan sentra produksi padi di Kabupaten Tana Toraja. Adanya kelompok tani yang telah mendapatkan pelatihan PHT dari Dinas Pertanian terdapat variasi tingkat partisipasi dan keberhasilan antar kelompok tani yang memungkinkan perbandingan antar unit sosial. Praktik lapang ini berlangsung dari April hingga Juni 2025.

Populasi dan Sampel (Responden)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang berusahatani pada lahan sawah dan ada kelompok tani yang telah mendapatkan PHT di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah populasi 325 KK. Penentuan responden dilakukan secara acak sederhana sebanyak $\pm 15\%$ sehingga jumlah sampel terpilih 49 orang petani sebagai responden yang terdiri dari 3 kelompok tani yaitu Kelompok Tani Harapan 8 orang, Kelompok Tani Tunas Bangsa 20 orang dan Kelompok Tani Makmur 21 orang.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan petani responden menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner), dan juga akan dilakukan observasi langsung di lapangan serta dokumentasi kegiatan kelompok. sedangkan data sekunder akan diperoleh dari instansi terkait seperti : Kantor Kecamatan, Dinas Pertanian, BPS dan BAPPEDA.

Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis melalui tabulasi kemudian di kelompokkan sesuai dengan kategori. Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang respon petani padi dalam implementasi PHT.

- a. Untuk menganalisis peran kelompok tani dalam implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada usahatani padi di Kecamatan Makale dianalisis dengan analisis kualitatif.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini ditabulasi, kemudian dianalisis secara deskripsi. Untuk mencapai tujuan penelitian maka hipotesis diuji secara statistik dengan menggunakan rumus persentase nilai (Padmowiharjo, 2000).

Total Nilai yang diperoleh

$$\frac{\text{Nilai Maksimum yang dicapai}}{\text{Nilai Maksimum yang dicapai}} \times 100 \%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kelompok Tani dalam Implementasi Pengendalian Hama Penyakit Terpadu (PHT) Usaha Tani Padi di Kecamatan Makale

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Yang dimaksud peran di sini adalah peran kelompok tani selain tugas pokoknya melaksanakan memantau kondisi lahan dan tanaman padi secara bersama-sama untuk mendeteksi dini serangan hama dan penyakit. Kelompok tani dalam melaksanakan tugas pokoknya tidak akan berhasil dengan baik bila kelompok tani tidak mampu memerankan peran-peran tambahan. Kelompok tani adalah sekumpulan petani yang bergabung untuk bekerja sama dalam mengelola kegiatan pertanian. Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pendapatan anggota melalui kegiatan bersama. Mengembangkan dan memajukan pembangunan pertanian, maka peran kelompok tani dalam makna agribisnis merupakan suatu tujuan pembangunan pertanian jangka panjang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berorientasi pada peningkatan produksi usaha tani dan nilai tambah produksi hasil pertanian.

Jadi peran kelompok tani dalam implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) meliputi : penyuluhan dan pelatihan PHT, Fasilitasi akses informasi dan sumber daya PHT, pengambilan keputusan dan implementasi PHT serta pengelolaan konflik dan kerjasama PHT. Kelompok tani berperan penting dalam Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada usaha tani padi. Berikut beberapa perannya :

a. Penyuluhan dan Pelatihan PHT

Penyuluhan dan pelatihan PHT harus menekankan pentingnya memahami ekosistem pertanian dan perannya dalam mengendalikan hama dan penyakit. Implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dalam penyuluhan dan pelatihan PHT bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran kelompok tani tentang cara pengelolaan hama yang efektif, efisien dan ramah lingkungan dalam mengelola hama dan penyakit tanaman terpadu. Beberapa aspek penyuluhan dan pelatihan PHT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Peran Kelompok Tani sebagai Aspek Penyuluhan dan Pelatihan PHT dalam Implementasi PHT, 2025.

No	Indikator Penyuluhan dan Pelatihan PHT	Persentase	Kategori
1	Kelompok tani kami secara rutin menyelenggarakan penyuluhan tentang PHT	73	Berperan
2	Materi penyuluhan yang disampaikan oleh kelompok tani sangat relevan dengan masalah hama/penyakit di lahan saya	61	Berperan
3	Saya memahami dengan baik materi penyuluhan PHT yang disampaikan oleh kelompok tani	70	Berperan
4	Kelompok tani memfasilitasi kegiatan pelatihan praktik PHT (misalnya : pembuatan pestisida nabati, identifikasi musuh alami)	58	Cukup berperan
Rata – rata		65,5	Berperan

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa peran kelompok tani sebagai sebagai aspek penyuluhan dan pelatihan PHT dalam Implementasi PHT meliputi : 1). Kelompok tani kami secara rutin menyelenggarakan penyuluhan tentang PHT kategori berperan dengan diperoleh 179 jumlah skor (73 %), 2). Materi penyuluhan yang disampaikan oleh kelompok tani sangat relevan dengan masalah hama/penyakit di lahan saya kategori berperan dengan diperoleh 149 jumlah skor (61 %), 3). Saya memahami dengan baik materi penyuluhan PHT yang disampaikan oleh kelompok tani kategori berperan dengan diperoleh 179 jumlah skor (70 %), dan 4). Kelompok tani memfasilitasi kegiatan pelatihan praktik PHT (misalnya : pembuatan pestisida nabati, identifikasi musuh alami) kategori cukup berperan dengan diperoleh 143 jumlah skor (58 %).

Dengan demikian peran kelompok tani sebagai aspek penyuluhan dan pelatihan PHT, nilai rata-rata yang diperoleh 65,5 dengan kategori berperan. Angka ini menunjukkan bahwa implementasi PHT memiliki peran yang tinggi sebagai aspek penyuluhan dan pelatihan PHT. Peran kelompok tani sebagai aspek penyuluhan dan pelatihan PHT diharapkan dapat memberikan motivasi kepada petani dalam memajukan usaha taninya, mendorong petani mengikuti penyuluhan yang terkait dengan padi dan mendorong petani meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pendapatan dalam berwirausaha. Penyuluhan dan pelatihan PHT harus mempromosikan penggunaan metode pengendalian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan agens hayati, tanaman perangkap dan pengelolaan habitat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Cahyanto dan Wardana (2024) yang mengemukakan bahwa penyuluhan dan pelatihan PHT (Pengendalian Hama Terpadu) sangat krusial dalam

memperkuat adopsi praktik ramah lingkungan di kalangan petani. Misalnya, penelitian di Jember menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas petani melalui kegiatan pelatihan PHT di Desa Sumberrejo berhasil meningkatkan kemampuan petani dalam mengidentifikasi hama dan menggunakan teknik pengendalian terpadu yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, studi pemberdayaan di kelompok wanita tani di Tangerang menegaskan bahwa metode penyuluhan (ceramah), demonstrasi pembuatan pestisida nabati, dan evaluasi rutin secara signifikan meningkatkan pengetahuan petani tentang pembuatan pestisida nabati dan pengendalian hama tanpa bergantung sepenuhnya pada pestisida kimia (Naula et, al 2022).

b. Fasilitasi Akses Informasi dan Sumber Daya PHT

Pengembangan sistem informasi yang dapat diakses oleh petani dan penyuluh untuk memperoleh informasi tentang PHT. Menyediakan sumber daya seperti buku, leaflet, video dan aplikasi yang terkait PHT. Fasilitasi akses informasi dan sumber daya PHT merupakan seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama. Sebagai fasilitasi akses informasi dan sumber daya PHT kelompok tani memiliki beberapa peran yang dapat dilakukan. Peran kelompok tani sebagai fasilitasi akses informasi dan sumber daya PHT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Peran Kelompok Tani Sebagai Fasilitasi Akses Informasi dan Sumber Daya PHT dalam Implementasi PHT, 2025.

No	Indikator Fasilitasi Akses Informasi dan Sumber Daya PHT	Persentase	Kategori
1	Kelompok tani aktif menyediakan informasi terbaru tentang PHT (misalnya : dari dinas pertanian, peneliti)	72	Berperan
2	Kelompok tani membantu anggota mendapatkan sarana produksi PHT (misalnya : benih unggul tahan hama, agen hayati, pupuk organik)	59	Cukup berperan
3	Kelompok tani memfasilitasi anggota untuk bertemu dengan penyuluh atau peneliti PHT	76	Berperan
Rata – rata		69	Berperan

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa peran kelompok tani sebagai fasilitasi akses informasi dan sumber daya PHT meliputi : 1) Kelompok tani aktif menyediakan informasi terbaru tentang PHT (misalnya : dari dinas pertanian, peneliti) kategori berperan dengan diperoleh 185 jumlah skor (72 %), 2). Kelompok tani membantu anggota mendapatkan sarana produksi PHT (misalnya : benih unggul tahan hama, agen hayati, pupuk

organik) kategori cukup berperan dengan diperoleh 145 jumlah skor (59 %), 3). Kelompok tani memfasilitasi anggota untuk bertemu dengan penyuluh atau peneliti PHT kategori berperan dengan diperoleh 187 jumlah skor (76 %).

Dengan demikian peran kelompok tani sebagai fasilitasi akses informasi dan sumber daya PHT nilai rata-rata yang diperoleh adalah 69 dengan kategori berperan. Angka ini menunjukkan bahwa bagi para anggota, kelompok tani berperan dalam memfasilitasi anggota dalam hal fasilitasi akses informasi dan sumber daya PHT, kerjasama dengan kelompok tani lain maupun pemerintah setempat dan lembaga keuangan yang ada. Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan penyuluh tentang PHT. Hal ini sejalan dengan Studi oleh Hendrival et al. (2025) menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan PHT yang dilakukan secara kelompok tani (melibatkan petani dan penyuluh) secara signifikan meningkatkan kemampuan petani dalam mengidentifikasi hama, mengambil keputusan pengendalian hama secara terpadu, dan mengaplikasikan teknologi pengendalian yang sesuai dengan agroekosistem. Penelitian Dhamayanti (2025) dengan studi kasus Kelompok Tani Sedyo Rukun di Bantul menegaskan bahwa para stakeholder (misal pemerintah desa dan dinas pertanian) berperan menyediakan fasilitas dan dukungan untuk kontrol hayati melalui kelompok tani; tetapi tantangan keberlanjutan tetap ada karena pemberian “power” atau kontrol secara penuh masih sangat terbatas.

c. Pengambilan Keputusan

Peran kelompok tani sebagai pengambilan keputusan dalam implementasi PHT, dimana penyuluhan dan pelatihan PHT harus membekali petani dengan keterampilan pengambilan keputusan yang tepat dalam mengendalikan hama dan penyakit. Penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dituntut akan kualifikasi tertentu yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh. Ada empat kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh mencakup : kemampuan dan keterampilan berkomunikasi dimana penyuluh mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat sasarnya, sikap penyuluh yang menghayati dan bangga terhadap profesinya serta merasakan bahwa kehadirannya untuk melaksanakan tugas penyuluhan sangat dibutuhkan masyarakat penerima manfaatnya, meyakini bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji kemanfaatannya dan inovasi yang akan disampaikan sesuai kebutuhan masyarakat sasarnya, dan menyukai serta mencintai masyarakat sasarnya dimana selalu siap memberikan bantuan dan melaksanakan kegiatan demi berlangsungnya perubahan usaha maupun kehidupan masyarakat penerima manfaat. Peran

kelompok tani sebagai pengambil keputusan dalam implementasi PHT, diharapkan senantiasa selalu memberikan gagasan dan ide-ide baru. Peran kelompok tani sebagai pengambil keputusan dalam implementasi PHT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Peran Kelompok Tani sebagai Pengambil Keputusan dalam Implementasi PHT, 2025.

No	Indikator Pengambil Keputusan	Persentase	Kategori
1	Kelompok tani melibatkan anggota dalam perencanaan kegiatan PHT yang akan dilakukan	78	Berperan
2	Saya menerapkan praktik PHT yang disarankan/dianjurkan oleh kelompok tani (misalnya : penanaman serentak, penggunaan varietas tahan lama)	62	Berperan
3	Kelompok tani melakukan pemantauan berkala terhadap penerapan PHT oleh anggota	71	Berperan
4	Kelompok tani mengevaluasi keberhasilan atau kendala dalam penerapan PHT	59	Cukup berperan
Rata – rata		67,5	Berperan

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa peran kelompok tani sebagai pengambilan keputusan meliputi : 1). Kelompok tani melibatkan anggota dalam perencanaan kegiatan PHT yang akan dilakukan kategori berperan dengan diperoleh 191 jumlah skor (78 %), 2). Saya menerapkan praktik PHT yang disarankan/dianjurkan oleh kelompok tani (misalnya : penanaman serentak, penggunaan varietas tahan lama) kategori berperan dengan diperoleh 151 jumlah skor (62 %), 3). Kelompok tani melakukan pemantauan berkala terhadap penerapan PHT oleh anggota kategori berperan dengan diperoleh 173 jumlah skor (71 %), 4). Kelompok tani mengevaluasi keberhasilan atau kendala dalam penerapan PHT kategori cukup berperan dengan demikian diperoleh 144 jumlah skor (59 %).

Dengan demikian peran kelompok tani sebagai pengambil keputusan dengan nilai rata-rata 67,5 dengan kategori berperan. Angka ini menunjukkan bahwa kelompok tani berperan dalam memberikan pengambilan keputusan sesuai kebutuhan petani. Kelompok tani mampu dalam memberikan gagasan atau terobosan terbaru pengembangan pengambilan

keputusan, terobosan terbaru dalam praktek secara langsung. Hal ini sejalan dengan Hamzah & Achdiyat (2022), yang mengemukakan bahwa kelompok tani berfungsi sebagai lembaga kerja sama yang mampu memfasilitasi pengambilan keputusan melalui musyawarah kelompok, diskusi rutin, dan koordinasi dengan penyuluh. Pengambilan keputusan bersama ini penting dalam praktik PHT karena petani perlu menentukan tindakan berdasarkan kondisi agroekosistem, evaluasi hama, dan ketersediaan sumber daya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa semakin kuat fungsi kerja sama dalam kelompok, semakin tinggi partisipasi petani dalam kegiatan PHT dan semakin tepat keputusan yang diambil terkait pengendalian organisme pengganggu tanaman. Selain itu, penelitian Azizah et al. (2025) menunjukkan bahwa kelompok tani memiliki peran dalam inovasi dan pengambilan keputusan terkait teknologi baru, termasuk pengendalian hayati, penggunaan varietas toleran hama, serta pengaturan musim tanam. Penelitian ini menemukan bahwa kelompok tani dapat menjadi pendorong utama dalam adopsi inovasi, ketika keputusan teknis didiskusikan bersama dan diuji melalui demonstrasi plot atau praktik langsung di lapangan. Dengan demikian, kelompok tani bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengambil keputusan strategis terkait arah pengembangan usaha tani.

d. Pengelolaan Konflik dan Kerjasama PHT

Sebagai pengelolaan konflik dan kerjasama PHT, kelompok tani harus mendorong kerjasama antara petani, penyuluh dan pihak lain dalam mengendalikan hama dan penyakit. Sebagian besar anggota memiliki usia yang sudah tidak muda dan memiliki pendidikan rendah, sehingga diperlukan teknik khusus untuk menyampaikan informasi kepada anggota. Peran kelompok tani sebagai pengelolaan konflik dan kerja sama PHT dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Peran Kelompok Tani sebagai Pengelola Konflik dan Kerjasama PHT dalam Implementasi PHT, 2025.

No	Indikator Konflik dan Kerjasama PHT	Persentase	Kategori
1	Kelompok tani berperan aktif dalam menyelesaikan masalah/konflik terkait hama dan penyakit di lingkungan petani	76	Berperan
2	Anggota kelompok tani sering bekerja sama dalam melakukan pengendalian hama secara kolektif	57	Cukup Berperan
Rata – rata		66,5	Berperan

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa peran kelompok tani sebagai pengelolaan konflik dalam implementasi PHT meliputi : 1). Kelompok tani berperan aktif dalam menyelesaikan masalah/konflik terkait hama dan penyakit di lingkungan petani kategori berperan dengan diperoleh 185 jumlah skor (76 %), dan 2). Anggota kelompok tani sering bekerja sama dalam melakukan pengendalian hama secara kolektif kategori cukup dengan diperoleh 139 jumlah skor (57 %).

Dengan demikian peran kelompok tani sebagai pengelolaan konflik dan kerjasama PHT mendapatkan nilai 66,5 dengan kategori berperan. Angka ini menunjukkan bahwa kelompok tani mampu bekerjasama dengan baik sehingga konflik bisa terkelola dengan baik pula. Kerjasama lain yang dapat dilakukan kelompok tani adalah bekerja sama dengan lembaga penelitian, universitas, dan organisasi pertanian untuk memperoleh informasi dan sumber daya PHT yang terbaru. Hal ini sejalan dengan Studi Aeny et al. (2024) juga memperkuat bahwa sinergi antara kelompok tani dan lembaga akademis mendorong penerapan PHT berbasis konservasi, seperti penanaman refugia dan pengelolaan musuh alami.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Bentuk peran kelompok tani dalam implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada usahatani padi di Kecamatan Makale meliputi : 1). Penyuluhan dan pelatihan PHT kategori berperan (65,5%) , 2). Fasilitasi akses informasi dan sumber daya PHT kategori berperan (69 %), 3). Pengambilan keputusan kategori berperan (67,5 %), dan 4). Pengelolaan konflik dan kersama PHT kategori berperan (66,5 %). Oleh karena itu perlu pengefektifkan dan mengoptimalkan penerapan sistem usaha tani padi yang diusahakan oleh petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeny, T. N., Wibowo, L., Yasin, N., & Sudarsono, H. (2024). Sosialisasi penerapan PHT dan penanaman refugia dalam budidaya padi berbasis konservasi. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 3(2), 113–123.
- Azizah, I. N., et al. (2025). Analisis tingkat adopsi petani terhadap penerapan PHT pada tanaman cabai di Kabupaten Magelang. *Jurnal Hortuscoler*, 4(1), 33–45. <https://jurnalpolitanipky.ac.id/index.php/JH/article/view/806>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja. (2023). *Statistik pertanian Kabupaten Tana Toraja 2022*. BPS Kabupaten Tana Toraja.
- Budiyanto, R. (2018). Peran kelompok tani dalam penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) di Kabupaten Sleman. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 6(2), 45–56. <https://doi.org/10.29244/jai.v6i2.13456>

- Cahyanto, S., & Wardana, R. (2024). Peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan hama terpadu (PHT) pada tanaman padi sawah di Desa Sumberrejo, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. *Agrimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Pertanian*, 3(2), 42–48. agrimas.polije.ac.id
- Cartwright, D., & Zander, A. (1968). *Group dynamics: Research and theory* (3rd ed.). Harper & Row.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Dhamayanti, C. S. (2025). Peran stakeholder pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman padi secara hayati oleh kelompok tani Sedyo Rukun, Kapanewon Bantul. *Journal of Agricultural Social and Business*, 4(1), 9–15.
- Effendi, H. (2020). Strategi komunikasi petani dalam pengendalian hama terpadu. *Jurnal Komunikasi Pertanian*, 4(1), 23–35.
- FAO. (2024). *Ecologically-based integrated pest management: Training guidelines for farmers*. Food and Agriculture Organization.
- Hamzah, I., & Achdiyat, A. (2022). Pengaruh peran kelompok tani terhadap partisipasi petani dalam pengendalian hama terpadu. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 18(1), 55–70.
- Hendrival, H., Baidhawi, B., Latifah, L., Muaz Munawwar, M., & Putri, N. P. (2025). Edukasi dan pendampingan program pengendalian hama terpadu bagi kelompok tani padi sawah guna peningkatan produksi. *Surya Abdimas*, 9(3), 343–351.
- Naully, D., Gustia, H., Rosdiana, Aminah, Swarnawati, Samidi, Aziz, N., ... Mauldiansyah, N. (2022). Penyuluhan pengendalian hama terpadu di kelompok wanita tani belimbing, Ciledug, Kota Tangerang. *Jurnal Abdidas*, 3(6), 989–996.
- Parsons, T., & Shils, E. A. (1951). *Toward a general theory of action*. Harvard University Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sudrajat, I. S. (2020). Role of farmer groups and field agricultural extension officer in the development of organic rice agricultural institutions in Boyolali Regency, Indonesia. *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare*, 10(2), 1–13.